

# Keputusan Jepang dalam Pembentukan China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA)

**Retno Anggraeni Nurvianti**

Departemen Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
Email: retnoanggraeni10@outlook.com

## *Abstract*

*This research aims to see the effect of Japan's relative power declining on Japan's decision in the formation of China-Japan-Republic of Korea (CJK) FTA. The decline in Japan's relative power began to occur as Japan experienced a weakening of economic growth since the 1990s to the present day. Japan's position as the second largest economic power in the world overtaken by China in 2010. The launch of CJK FTA negotiations took place in 2012, along with escalation of conflict between China and Japan. Although the initiation of the formation of CJK FTA has occurred since 2002 but the talks related to the formation of CJK FTA ran slowly. The slow pace in the formation of CJK FTA came from Japan reluctant to forming CJK FTA. This paper links the relative power decline of Japan to institutional balancing strategies undertaken by Japan in the formation of CJK FTA. This study measures three things: the relative power decline of Japan, the level of economic interdependence, and the condition of power distribution between CJK.*

**Kata Kunci:** *CJK FTA, relative power declining, institutional balancing, economic interdependence, power distribution.*

Pemerintahan Tiongkok telah beberapa kali menawarkan proposal pembentukan FTA yang melibatkan Jepang, namun kemudian ditolak oleh Jepang. Pertama, pada pertemuan ASEAN Plus Three (APT) tahun 2002, pada saat Premier Tiongkok, Zhu Rongji secara informal menawarkan pembentukan FTA antara Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Namun, Jepang menolak dengan alasan harus memastikan terlebih dahulu seberapa dalam komitmen Tiongkok terhadap aturan-aturan WTO sebelum berdiskusi terkait FTA (Urata 2007). Kedua, pada ASEAN Summit di Bali tahun 2003, Tiongkok kembali mengajak Jepang untuk melakukan pembentukan FTA, namun kali ini adalah pembentukan FTA bilateral antara Jepang dan Tiongkok. Respon Jepang masih sama, yaitu dengan

menyebutkan akan dilakukan studi lebih lanjut. Respon Jepang tersebut mengindikasikan penolakan atas ajakan Tiongkok. Ketiga, pada saat pertemuan *high level economic dialogue meeting* di Beijing pada November 2007 yang mempertemukan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda dan PM Tiongkok Wen Jiabao. Pertemuan tersebut menghasilkan laporan penelitian bersama yang bernama *Medium to Long Term Vision for Japan-China Economic and Trade Cooperation* (Bo 2008). Meskipun demikian kedua negara tidak memasukkan FTA ke dalam pokok pembahasan, melainkan hanya meyinggung hal-hal terkait kerjasama non-FTA seperti isu perubahan iklim, energy, *currency forgery* dan apresiasi RMB (Rathus 2007, hal. 82).

Ketidakinginan Jepang untuk menjalin FTA dengan Tiongkok berubah pada saat pembentukan trilateral FTA yang melibatkan Tiongkok dan Korea Selatan menemui kesepakatan. *China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement* atau yang dikenal sebagai CJK FTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang berhasil diluncurkan secara formal untuk memasuki tahapan negosiasi oleh ketiga negara pada 20 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja dalam acara Summit ke-21 ASEAN (China FTA Network 2012). Keputusan pembentukan CJK FTA sebelumnya telah melalui proyek penelitian bersama atau *joint research* yang dilakukan ketiga negara tersebut sejak tahun 2003 hingga 2009. Pada tahun 2010, kemudian dibentuk *Joint Study Committee* (JSC) untuk CJK FTA. Melalui JSC dilaporkan bahwa gabungan ekonomi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan memegang hampir 20 persen dari total GDP dunia, sehingga pembentukan FTA diantara ketiganya tidak hanya akan membawa keuntungan bagi integrasi ekonomi regional, namun juga dunia (Joint Study Committee 2011). Proses negosiasi dalam pembentukan CJK FTA sendiri telah dilakukan sejak tahun 2013 secara rutin setiap tahunnya, dan pada tahun 2017 telah memasuki putaran negosiasi kesebelas (Ministry of Economy Trade and Industry Japan 2017). CJK FTA saat ini masih dalam status *under negotiation*. Meskipun demikian, ketiga negara telah memperlihatkan perhatiannya dalam mempercepat proses negosiasi tersebut.

Pembentukan CJK FTA terjadi di tengah kondisi bilateral Jepang dan Tiongkok yang sedang buruk. Pada kurun waktu 2010 hingga 2012, terjadi serangkaian peristiwa yang merenggalkan hubungan bilateral kedua negara. Pada akhir tahun 2010, terdapat peristiwa tabrakan antara kapal nelayan Tiongkok dengan kapal patroli laut Jepang di daerah dekat pulau Senkaku (William 2010). Penahanan kapten kapal Tiongkok oleh Jepang, kemudian

memicu kemarahan Tiongkok. Merespon hal tersebut, Tiongkok menuntut pembebasan segera kapten kapal yang ditahan namun juga melakukan penahanan terhadap empat orang pengusaha Jepang yang diduga melakukan aktivitas spionase dan ekspor terlarang bahan logam langka. Berlanjut pada tahun 2012, terjadi peristiwa pembelian tiga pulau di kepulauan Senkaku dari kepemilikan pribadi warga Jepang. Peristiwa tersebut kemudian memicu demonstrasi anti-Jepang besar-besaran yang berujung pada tindakan anarkis seperti pengerusakan mobil, pabrik dan toko milik Jepang di Tiongkok pada September 2012 (Ian dan Thom 2012).

Selain itu, pada tahun 2010 juga ditandai dengan diambil alihnya posisi Jepang sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia oleh Tiongkok (Teather 2010). Pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2010 hanya sebanyak 0.1 persen dengan GDP sebesar USD 1.28 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 9 persen dalam setahun, bahkan diprediksi akan mengungguli Amerika Serikat pada 2030. Sementara itu Jepang terus mengalami pelemahan ekonomi sejak tahun 1990an setelah pada tahun 1968 berhasil menyalip Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Jepang juga mengalami masalah demografi yaitu masalah populasi tua atau dikenal sebagai *graying age population*. Setiap empat orang terdapat satu penduduk tua – diatas 65 tahun – di Jepang, yang diperkirakan akan mencapai persentase 40 persen pada tahun 2050. Jumlah penduduk Jepang juga diperkirakan menurun dari 127 juta ke 97 juta pada tahun 2050 (Smil 2015). Perusahaan elektronik Jepang juga mengalami penurunan operasi bisnis akibat mengalami kesulitan dalam kompetisi produk murah dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Kerugian dialami oleh perusahaan Jepang seperti Sharp – merupakan perusahaan terbesar Jepang sebagai produsen LCD- yang mengalami kerugian sebesar 10 miliar US Dollar

sejak 2010 hingga 2016. Bahkan Sharp dikabarkan akan diambil alih oleh perusahaan Taiwan Foxconn dengan tawaran sebesar 600 miliar Yen atau 5 miliar US Dollar (Soble dan Paul 2016).

Dari latar belakang diatas, penulis beranggapan bahwa kasus pembentukan CJK FTA menarik untuk diteliti. Khususnya terkait perubahan sikap Jepang dalam inisiasi pembentukan CJK FTA yang sebelumnya mengindikasikan sikap penolakan terhadap keterlibatan Tiongkok, namun justru menyetujui pembentukan CJK FTA disaat hubungan bilateral kedua negara sedang tidak baik. Disamping itu kondisi Tiongkok yang tengah naik menjadi raksasa ekonomi, seharusnya menjadi ancaman bagi Jepang. Penulis beranggapan bahwa perubahan sikap Jepang dipicu oleh penurunan *power* relatif yang sedang dialami Jepang, sehingga Jepang melakukan institusional *balancing* dalam pembentukan CJK FTA.

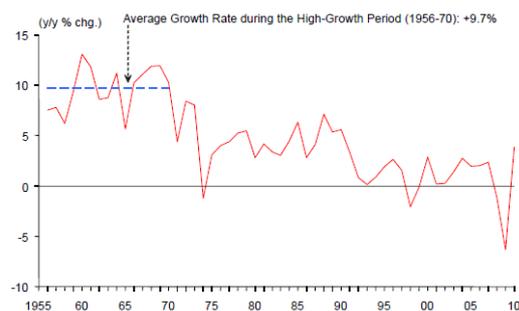
### Penurunan *Power* Relatif Jepang

Di dalam sistem internasional, *power* negara tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis melainkan dinamis secara vertikal. Maksud dari dinamis secara vertikal adalah negara dalam sistem internasional mengalami situasi naik atau *rising* dan turun atau *declining*. Teori yang menjelaskan mengenai penguatan dan pelemahan suatu negara adalah *power cycle theory*. *Power cycle theory* mengasumsikan bahwa setiap negara berada dalam sebuah siklus yang terbentuk dari pembagian *power* relatif selama periode tertentu (Doran 2005, hal. 686). Konsep *power* dalam teori *power cycle* adalah segala persepsi yang dilihat atau dirasa oleh pemerintah suatu negara sebagai kekuatannya. Persepsi *power* dikorelasikan sebagai indikator yang ada dalam kapabilitas nasional negara – seperti GDP, pendapatan per kapita, ukuran kekuatan militer, belanja militer, ukuran populasi, dan kapasitas inovasi teknologi – sehingga dapat memfasilitasi negara untuk menjalankan peran kebijakan luar negeri dan karenanya mampu

mengubah siklus *power* negara (Doran 2012). Menguat atau melemahnya suatu negara diukur melalui *relative share* atau bagian relatif dari jumlah *power* di dalam sistem pusat (Doran 2005, hal. 687). Menguat atau melemahnya *power* negara dapat diukur saat satu negara mengalami peningkatan *power* relatif dan negara lainnya otomatis mengalami penurunan *power* relatif. Sehingga *power* relatif dapat diukur melalui menguat atau melemahnya *power* negara terhadap negara lain dalam sistem.

Fase *high-growth* ekonomi Jepang terjadi pada rentang waktu dimulai dari pertengahan tahun 1950an dan berakhir pada tahun 1970an. Pada masa *high-growth* tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jepang berada diatas angka 10% (lihat gambar 1). Tahun 1970 hingga 1980an, Jepang memasuki masa kejayaan ekonomi yang ditandai dengan kestabilan ekonomi dan masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan jika dibandingkan dengan negara ekonomi maju lainnya. Amerika Serikat merupakan pemeran utama dibalik kesuksesan ekonomi Jepang paska Perang Dunia I.

Gambar 1. Pertumbuhan GDP Jepang sejak Periode *High-Growth*



Sumber: Cabinet Office, *National Accounts*

Pada tahun 1945-1947, Jepang melakukan reformasi sosial politik dan ekonomi secara besar-besaran yang didorong oleh campur tangan Amerika Serikat (Duus 1976, hal. 238). Peran Amerika Serikat tidak hanya untuk mengontrol Jepang paska Perang Dunia

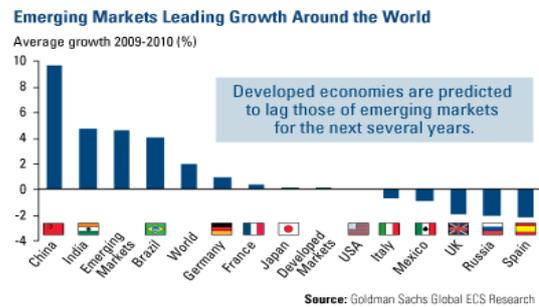
II, namun juga memberikan jaminan keamanan bagi Jepang. Pemberhentian pengembangan militer Jepang, menjadikan negara memfokuskan segala modal, *skills*, dan juga energi – yang semula pada saat perang difokuskan pada militer – kepada ekonomi (Duus 1976, hal. 256). Selain itu, tujuan Jepang untuk mengejar ketertinggalan teknologinya dari negara-negara Barat juga dimudahkan akibat adanya beberapa faktor seperti kedekatan hubungan korporasi Jepang dengan pemerintah dan juga posisi strategis Jepang bagi Amerika Serikat pada masa Perang Dingin.

Keberadaan transfer teknologi dari Amerika Serikat, membuat Jepang berupaya untuk membuat barang berkualitas tinggi agar mampu diterima oleh pasar Amerika Serikat. Terlebih setelah tahun 1954 pihak Amerika Serikat melalui sekretaris Dulles memberikan komentar kepada PM Yoshida bahwa manufaktur Jepang tidak memberikan apa yang diinginkan pasar Amerika Serikat. Bahkan, Dulles juga memperlihatkan pakaian hasil buatan Jepang yang menggunakan material murah (Forsberg 2000, hal. 221). Jepang terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas produksinya untuk pasar internasional, sehingga berbagai standarisasi produk diberlakukan oleh Jepang melalui pembentukan Export Inspection Law pada tahun 1957.

Perkembangan teknologi dan peningkatan mutu produksi Jepang diupayakan untuk membuka akses Jepang kepada pasar internasional, khususnya Amerika Serikat. Oleh karenanya tujuan kebijakan perdangan internasional yang dilakukan adalah untuk mempromosikan ekspor dibanding melakukan impor bahan mentah yang tidak dimiliki oleh Jepang – Jepang tidak kaya sumber bahan mentah seperti minyak, bijih besi, kapas, dan lainnya. Komitmen Jepang untuk mempromosikan ekspor nyatanya berhasil dalam menumbuhkan ekonomi Jepang.

Pelemahan ekonomi Jepang terjadi sejak memasuki tahun 1990an disaat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara-negara berkembang mulai meningkat. Kawasan Asia merupakan kawasan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan karena memuat sebagian besar negara *emerging* seperti Tiongkok, Korea Selatan, India, Indonesia, dan lain sebagainya. Pada tahun 2009-2010, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara *emerging* sebesar lebih dari 4 persen, sementara negara maju kurang dari 2 persen (lihat gambar 2). Naiknya pertumbuhan ekonomi negara *emerging*, berimplikasi pada membesarnya kapasitas pasar negara *emerging* akibat peningkatan konsumerisme masyarakatnya. Hal tersebut menjadikan pasar negara *emerging* menjadi tujuan dagang dan menarik aktivitas bisnis dunia.

Gambar 2. Pertumbuhan GDP Negara *Emerging* dan Negara Maju tahun 2009-2010



Potensi yang dimunculkan oleh pasar negara *emerging*, juga mempengaruhi Jepang dalam melaksanakan kebijakan perdagangan internasionalnya. Jepang yang dikenal kedekatan dan ketergantungannya pada pasar negara Barat, mulai menggeser fokus dagangnya ke wilayah Asia Pasifik. Pidato PM Jepang Yukio Hatoyama dalam acara summit APEC di Singapura tahun 2009, menyatakan:

*“Today, there is no question about the importance of Asia. The world is becoming increasingly multipolar. If we look at economic power against this backdrop, we see that the ASEAN Plus*

Six countries produced about 23 percent of the world's Gross Domestic Product in 2008 while APEC economies accounted for more than 52 percent. These figures are likely to grow (...) Japan has begun to face "post-economic growth challenges" well before many other Asian nations (...) First of all, we need to cooperate to prosper together. The experiences of Europe and ASEAN show that developing economic ties in principle promotes cooperation. Economic partnership agreements (EPAs) and free trade agreements (FTAs) are effective ways to promote such economic ties in the region under a common set of rules" (Hatoyama 2009).

Melalui pidato tersebut, dapat dilihat bahwa Jepang membutuhkan pasar negara *emerging* di Asia Pasifik untuk mendukung kepentingan ekonominya. Untuk mencapai kepentingan ekonomi tersebut, Jepang memerlukan integrasi ekonomi dengan negara kawasan Asia Pasifik sehingga berkomitmen untuk lebih memasukkan diri pada regionalisme kawasan melalui berbagai perjanjian perdagangan ekonomi EPA dan FTA (Japan External Trade Organization 2010). Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Jepang tengah menggeser preferensi dagangnya yang semula fokus pada pasar negara Barat menjadi kepada pasar negara *emerging*, khususnya Asia.

Korporasi Jepang mengalami kemunduran *market share* dan *profit* selama kurun waktu 1990 hingga 2010 (Kazuhiko 2015). Bahkan, menurut data yang diperoleh dalam Fortune's Global 500 List, pada tahun 1995 terdapat 141 perusahaan Jepang yang masuk ke dalam 500 perusahaan terbaik dunia. Namun pada tahun 2010 ditemukan hanya 71 perusahaan. Produk Jepang

dikenal sukses beredar di pasar negara maju pada kisaran tahun 1970-90an, sehingga membuat nama perusahaan Jepang mendunia. Namun keberadaan produk Jepang di pasar negara *emerging* tidak sesukses seperti pada pasar negara maju (lihat gambar 3). Dari lima negara *emerging*, dominasi pasar perusahaan Jepang hanya terlihat di dua negara, yaitu India dan Indonesia. Bahkan, pada tahun 2005 hingga 2010, Honda, Sony dan Toyota – perusahaan yang memperoleh pendapatannya dua per tiga dari hasil penjualan luar negeri – mengalami kemunduran atau stagnasi penjualan di luar negeri (Ichii et al. 2012).

Jepang membutuhkan pasar negara *emerging* di Asia Pasifik untuk mendukung kepentingan ekonominya. Untuk mencapai kepentingan ekonomi tersebut, Jepang memerlukan integrasi ekonomi dengan negara kawasan Asia Pasifik

Gambar 3. Penguasaan Korporasi di Brazil, Russia, India, Tiongkok dan Indonesia

	BRAZIL	RUSSIA	INDIA	CHINA	INDONESIA
AUTOMOTIVE	FIAT	AVTOVAZ	SUZUKI	VOLKSWAGEN	TOYOTA
TVS	LG	SAMSUNG	LG / SAMSUNG	HISENSE	LG
HOME APPLIANCES	WHIRLPOOL	INDESIT	LG	HAIER	SHARP
RETAIL HYGIENE	P&G	P&G	P&G	P&G	UNICHARM
BEAUTY & PERSONAL CARE	NATURA	P&G	UNILEVER	P&G	UNILEVER
BEVERAGES	ABI	CARLSBERG	UB GROUP	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	SINAR SOSRO
PACKAGED FOOD	NESTLÉ	WIMM-BILL-DANN	GUJARAT COOP MILK MARKETING	INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY	INDOFOOD SUKSES HAKHUR
MNC	LOCAL COMPANY	JAPANESE COMPANY			

*Kaisha* model merupakan sistem manajemen bisnis Jepang yang sukses mengembangkan bisnis korporasi Jepang pada tahun 1960 hingga 1980an (Kazuhiko 2015). Namun, penggunaan model korporasi tradisional – *kaisha* model – ini dipandang tidak lagi memadai di era globalisasi dan digitalisasi. Perusahaan Jepang terlambat dalam beradaptasi untuk memenangkan pangsa di *emerging market* (EM). Perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional Barat lebih cepat merespon dan beradaptasi dengan kondisi EM. Beberapa faktor menjadi penyebab kegagalan perusahaan Jepang dalam merebut pangsa pasar di negara *emerging* (Ichii et al. 2012). Pertama, keengganan dalam memperhatikan

segmen produk *middle and low-end* yang laris di EM. Perusahaan Jepang dikenal sebagai perusahaan yang memiliki fokus dalam produksi produk *high end* yang cenderung berhasil saat perusahaan Jepang memasarkan produk di negara maju. Kedua, perusahaan Jepang enggan melakukan ekspansi melalui merger, akuisisi, dan *partnership* di EM. Perusahaan Jepang lebih memilih untuk melakukan ekspansi sendiri sehingga sulit untuk melakukan penetrasi di pasar lokal EM. Karakter perusahaan Jepang juga masih lebih banyak fokus terhadap pasar domestik dan pasar negara maju dibandingkan dengan EM (lihat gambar 3).

Gambar 3. Persebaran Perusahaan Jepang di Pasar Dunia



Ketiga, perusahaan Jepang masih belum memberikan komitmen secara finansial maupun organisasional untuk dapat diterima di EM. Investasi perusahaan Jepang masih banyak dialokasikan di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Hingga akhir tahun 2010, Amerika Serikat dan Eropa Barat memiliki FDI Jepang sebanyak 54 persen. Keempat, kurangnya penempatan *high ranking executive* maupun pemberian kesempatan bagi eksekutif lokal untuk menjalankan bisnis di perusahaan. Perusahaan Jepang enggan memberikan posisi strategis di perusahaan bagi penduduk lokal, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan produk terhadap preferensi lokal (Ichii et al. 2012).

Penurunan *power* relatif Jepang juga dapat dilihat dari permasalahan demografi. Permasalahan demografi Jepang terletak pada meningkatnya jumlah *aging society* atau masyarakat tua – berumur diatas 65 tahun.

Sebanyak 25 persen populasi Jepang diisi oleh masyarakat berumur 65 tahun keatas. Proporsi peningkatan masyarakat tua naik sebanyak 14 persen pada tahun 1994 ke 21 persen pada 2007 (Atsushi 2015). Fenomena peningkatan masyarakat tua diperparah dengan kondisi penurunan angka kelahiran di Jepang. Angka kelahiran Jepang paska Perang Dunia II sebanyak 4,5 kelahiran per wanita menurun secara drastis dalam kurun waktu 1960-1970 sebanyak 2 kelahiran per wanita. Penurunan angka kelahiran terus terjadi hingga diwabah 2 kelahiran per wanita sejak tahun 1975 dan terus menurun ke angka dibawah 1,5 kelahiran pada tahun 1995. Selain itu Jepang juga diprediksi akan kehilangan jumlah angkatan kerja yang berusia 20 hingga 64 tahun, diperkirakan menurun dari 75,6 juta pada 2010 menjadi 41 juta pada 2060. Sehingga dalam kurun waktu 50 tahun, Jepang akan kehilangan 46 persen populasi angkatan kerjanya (Tsuya 2014, hal. 5).

Lebih lanjut, penurunan *power* relatif juga menggeser pola perdagangan Jepang. Perubahan terjadi pada mitra dagang antar ketiga negara CJK sejak tahun 1992 hingga 2011. Bagi Jepang, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar sebagai tujuan ekspor utama sejak paska Perang Dunia II, namun pada tahun 2009 posisi Amerika Serikat telah diambil oleh Tiongkok. Sejak tahun 1992 hingga 2011 kontribusi Tiongkok terhadap ekspor Jepang naik dari 3,5 persen ke 19,6 persen, sedangkan Korea Selatan juga naik dari 5,2 persen ke 8 persen (IMF 2012). Sehingga total kontribusi kedua negara tersebut terhadap ekspor Jepang naik dari 8,7 ke 27,6 persen dalam kurun waktu 1992 hingga 2011. Pada impor Jepang, Tiongkok juga menggeser kedudukan Amerika Serikat sebagai mitra impor utama Jepang pada tahun 2002. Bagi Tiongkok, kontribusi Jepang dalam ekspor Tiongkok menurun dari 13,7 persen pada tahun 1992 ke 7,7 persen pada tahun 2011 (IMF 2012). Sedangkan kontribusi Korea Selatan dalam ekspor Tiongkok pada periode

tahun yang sama, naik dari 2,8 persen ke 4,4 persen. Sedangkan impor Tiongkok dari Jepang turun sebanyak 16,7 persen ke 11,2 persen, dan dari Korea Selatan naik dari 3,2 persen ke 9,3 persen pada tahun 1992 dan 2011 (IMF 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat dependensi pada ekspor dan impor intra regional antar CJK meningkat dalam kurun waktu 1992 hingga 2011 (Lee 2013, hal. 153). Dependensi ekspor dan impor Korea Selatan pada tahun 2011 yaitu 30,9 persen dan 29,5 persen. Sedangkan dependensi Tiongkok 12,1 persen untuk ekspor dan 20,4 persen untuk impor. Jepang merupakan negara yang memperlihatkan peningkatan dependensi paling signifikan diantara dua negara lainnya, yaitu dependensi ekspor Jepang terhadap kawasan naik dari 8,7 ke 27,6 persen dan dependensi impor Jepang naik dari 12,3 ke 26,2 persen.

### Dinamika FTA Jepang dan Pembentukan CJK FTA

Kebijakan luar negeri dalam pembentukan perdagangan bilateral ataupun multilateral dapat diteliti melalui kerangka institusional realisme (He 2009, 8). Institusional realisme dibangun atas gabungan antara postulat *balance of power theory* dan *neoliberal interdependence*. Sehingga institusional realisme memiliki dua postulat yaitu, 1) bahwa tingginya tingkat interdependensi membuat negara memilih strategi *institutional balancing* dibandingkan pemilihan aliansi militer tradisional untuk mengatasi ancaman atau tekanan dari sistem, dan 2) distribusi dari kapabilitas di dalam sistem regional mengindikasikan

bagaimana negara membentuk *institutional balancing*, secara inklusif atau eksklusif. *Institusional realism* beranggapan bahwa terdapat kondisi tertentu saat negara memilih *institutional balancing* untuk bergabung dengan yang lainnya (He 2009, hal. 10). Kondisi tersebut dapat dilihat dari dua prasyarat utama, yaitu distribusi *power* dalam sistem – melalui tipe polaritas seperti unipolar, bipolar dan multipolar – dan juga interdependensi ekonomi antar negara yang terlibat. Kedua prasyarat tersebut digunakan untuk menilai apakah negara melakukan *power balancing* atau *institutional balancing*. Saat sistem berada pada situasi multipolar ditunjang dengan tingkat interdependensi ekonomi yang tinggi, maka negara cenderung melakukan *institutional balancing*.

Kedekatan dan ketergantungan Jepang pada Amerika Serikat paska Perang Dunia hingga Perang Dingin, membuat orientasi kebijakan perdagangan internasional Jepang hanya tertuju pada pasar Amerika Serikat. Jepang juga berusaha untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan dunia dengan cara liberalisasi pasar. Oleh karenanya Jepang kemudian tergabung dalam GATT pada tahun 1955, meskipun Jepang masih diperlakukan secara diskriminasi dibawah Article XXXV GATT (Ogita 2002). Hal tersebut membuat Jepang pada pasca-Perang Dunia II cenderung untuk mengarahkan kebijakan perdagangannya kepada multilateralisme seperti yang berada dibawah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perubahan orientasi kebijakan perdagangan Jepang kepada FTA terjadi pada tahun 2000, yang ditandai dengan pembentukan *joint study* dalam inisiasi pembentukan Jepang-Singapura FTA (JSEPA).

Dependensi ekspor dan impor Korea Selatan pada tahun 2011 yaitu 30,9 persen dan 29,5 persen. Sedangkan dependensi Tiongkok 12,1 persen untuk ekspor dan 20,4 persen untuk impor. Jepang merupakan negara yang memperlihatkan peningkatan dependensi paling signifikan diantara dua negara lainnya, yaitu dependensi ekspor Jepang terhadap kawasan naik dari 8,7 ke 27,6 persen dan dependensi impor Jepang naik dari 12,3 ke 26,2 persen.

Perubahan orientasi tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam *Diplomatic Blue Book* tahun 2000 yang menyebutkan bahwa “*As long as regional trade agreements are consistent with the WTO Agreement, they would promote open trade rather than acting as a barrier to non-member countries, contribute to the expansion of world trade, and complement the multilateral trading system*” (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2000). Pemilihan partner FTA Jepang lebih banyak mengarah kepada negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Terlihat dari partner FTA Jepang sejak tahun 2002 hingga 2012 dari 12 negara partner FTA – tidak termasuk ASEAN – yang telah berstatus *in force*, 11 diantaranya merupakan negara berkembang (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2017). Jepang juga lebih banyak membentuk FTA dengan karakteristik yaitu berbentuk Economic Partnership Agreements (EPAs) karena melingkup elemen yang lebih besar, tidak hanya sebatas pengurangan tarif.

Kawasan Asia Timur Laut merupakan satu-satunya kawasan besar di dunia yang belum memiliki perjanjian perdagangan pada level regional. Meskipun demikian sejak krisis finansial Asia, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan (CJK) telah mulai memandang pentingnya kerjasama lebih dalam terkait finansial dan perdagangan pada level regional. Sehingga CJK mulai mengikuti tren global untuk membentuk FTA. Namun ketiga negara CJK telah mendiskusikan pembentukan intra-regional FTA, yaitu dua FTA bilateral antara Jepang-Korea (JK) FTA dan Tiongkok-Korea (CK) FTA, dan satu FTA trilateral yaitu CJK FTA. Diantara ketiga rancangan FTA, CJK FTA merupakan salah satu yang sedang memperlihatkan progres baik saat ini.

Rencana pembentukan kerjasama ekonomi trilateral antar negara CJK, telah disinyalkan sejak tahun 1999 melalui pembentukan *Trilateral Joint Research on Economic Cooperation*. Namun penelitian secara resmi dan intensif baru dilakukan oleh institusi penelitian ketiga negara pada tahun 2003 hingga 2009 dan dilanjutkan dengan melibatkan pemerintahan resmi melalui *Joint Study Meeting* pada tahun 2010 hingga 2011. Lalu secara resmi CJK FTA diluncurkan pada 20 November 2012 dalam pertemuan Japan-China-ROK Economic and Trade Ministers di Phnom Penh, Kamboja. Perwakilan menteri yang

menandatangani kesepakatan peluncuran CJK FTA adalah Edano Yukio dari Jepang, Chen Deming dari Tiongkok, dan Bark Tae Ho dari Korea Selatan (Ministry of Economic Trade and Industry Japan 2012).

Konstruksi pembentukan CJK FTA sangat sulit dipengaruhi oleh adanya tingkat kepercayaan atau *mutual trust* yang tinggi antar ketiga negara. Terlebih bagi Tiongkok dan Jepang yang secara historis telah memiliki ketegangan hingga menjadi rival di kawasan Asia Timur Laut. Salah

karakter dalam regionalisme di Asia Timur Laut adalah menghindari satu kekuatan dominan atau *strong leadership* (Bae 2015, 14). Sebagaimana telah disinggung diatas, mulanya Jepang menyikapi CJK FTA dengan pesimis akibat adanya faktor Tiongkok. Jepang yang merupakan negara maju dan Tiongkok yang sedang *rising*, telah berlomba dalam kompetisi FTA khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara tersebut sama-sama menginginkan posisi *leading* di dalam kawasan regional Asia Timur. Jika dilihat dari pembentukan FTA di kawasan Asia Timur Laut yang tidak memungkinkan FTA bilateral antara Tiongkok dan Jepang terjalin.

Jepang yang merupakan negara maju dan Tiongkok yang sedang *rising*. Kedua negara tersebut sama-sama menginginkan posisi *leading* di dalam kawasan regional Asia Timur, sehingga tidak memungkinkan bila FTA bilateral antara Tiongkok dan Jepang terjalin

Namun perhatian Jepang pada CJK FTA kemudian terlihat saat pembentukan *joint study* CJK FTA tahun 2010 yang semula direncanakan berlangsung selama dua tahun dipercepat untuk selesai pada saat trilateral summit, Mei 2011. *Joint study* kemudian rampung pada Desember 2011, dan hasilnya dipublikasikan pada Maret 2012. Perkembangan tersebut diikuti pula dengan penandatanganan kesepakatan trilateral investment agreement, dan penemuan kesepakatan untuk meluncurkan negosiasi pembentukan CJK FTA pada tahun 2012 (Yoshimatsu 2015, 108). Perubahan sikap Jepang untuk terlibat dalam pembentukan CJK FTA, ditelusuri melalui kepentingan Jepang dibalik kerjasama trilateral di kawasan. Jepang enggan menandatangani CJK FTA sebelum Trilateral Investment Treaty (TIT) antar negara CJK ditandatangani. Sedangkan Tiongkok menolak menandatangani TIT sebelum FTA ditandatangani. Hal ini kemudian membuat pembentukan FTA terkendala sejak tahun 2003 hingga 2012. Namun Tiongkok akhirnya mau untuk menandatangani TIT, setelah Jepang mengutarakan minatnya untuk bergabung ke dalam TPP pada tahun 2011.

FTA di kawasan Asia Timur Laut dapat terjadi diantara Jepang-Korea Selatan dan juga Tiongkok-Korea Selatan terlihat dari telah adanya upaya pembentukan JK FTA maupun CK FTA. Maka dapat dikatakan bahwa Korea Selatan dibutuhkan sebagai hub diantara rivalitas Tiongkok dan Jepang. Maksudnya adalah Korea Selatan dapat menjadi jembatan penghubung antara Jepang dan Tiongkok di kawasan. Korea Selatan juga merupakan negara *middle power*, sehingga posisinya sangat atraktif bagi Jepang maupun Tiongkok. Terbukti dari upaya-upaya pembentukan bilateral FTA dengan Korea Selatan yang dilakukan baik oleh Jepang maupun Tiongkok. Faktor penting Korea Selatan bagi Jepang juga tercermin saat Jepang memutuskan untuk terlibat dalam FTA yang melibatkan Tiongkok dan Korea Selatan.

Salah satu faktor pendorong keputusan tersebut adalah saat Tiongkok dan Korea Selatan memutuskan untuk memulai negosiasi pada CK FTA. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu petinggi dari *ministry* Department of International Trade and Economic Affairs China saat konferensi pada *Trilateral FTA Feasibility Study* di Qingdao:

*“Japan is becoming increasingly “eager” to join a free trade agreement with China and South Korea while it is unable to join a broader Asian trade pact, and as Beijing and Seoul began negotiations on an agreement. Late last year, Japan was not very active regarding the trilateral FTA”* (Qingfen 2012).

Mekipun pembentukan FTA antara Tiongkok dan Korea Selatan, dapat dianggap sebagai ancaman bagi Jepang, namun pemicu dari pembentukan FTA bilateral tersebut berawal dari Jepang yang memutuskan untuk berpartisipasi pada TPP tahun 2011. PM Yoshihiko Noda mengumumkan bahwa Jepang akan berpartisipasi kedalam TPP pada November 2011 dengan menyatakan *“I have decided to enter into consultations toward participating in the Trans-Pacific Partnership negotiations with the countries concerned”* (Noda 2011). Pengumuman keinginan Jepang untuk bergabung kedalam TPP, kemudian direspon oleh Tiongkok dengan mendorong Korea Selatan untuk membentuk China-Korea FTA pada Januari 2012.

### **Kesimpulan**

Melalui hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Jepang mengalami penurunan *power* relatif yang ditandai dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi Jepang dibandingkan dengan Tiongkok maupun Korea Selatan. Terlihat dari tiga faktor yang mampu menggambarkan kondisi penurunan *power* relatif Jepang yaitu pertama, akibat perubahan kondisi lingkungan internasional yang semula terpusat pada Amerika Serikat menjadi multipolar atas hadirnya EM yang kapasitas

ekonominya mulai menyaingi Amerika Serikat. Kedua yaitu akibat ketidakmampuan korporasi Jepang beradaptasi dengan lingkungan bisnis di EM. Ketiga yaitu karena Jepang tengah mengalami masalah demografi, yaitu percepatan populasi tua, penurunan angka kelahiran, hingga berimplikasi pada penurunan jumlah populasi.

Penurunan *power* relatif Jepang berimplikasi pada perubahan orientasi kebijakan perdagangan Jepang. Kondisi multipolar yang terjadi antar CJK membuat ketiga negara berupaya untuk saling berlomba dalam membentuk perjanjian perdagangan atau FTA dengan negara lain. Pembentukan FTA dengan mitra lain dipandang sebagai ancaman antar negara CJK. Namun disatu sisi interdependensi ekonomi antar ketiga negara cukup tinggi, sehingga perjanjian perdagangan bebas menguntungkan bagi kawasan. Terlebih bagi Jepang yang tengah mengalami penurunan *power* relatif, yang membuat

interdependensi Jepang terhadap ekonomi kawasan meningkat. Keengganan Jepang dalam membentuk CJK FTA didasari pada kepentingan Jepang untuk membentuk TIT sebelum pembentuk FTA dilakukan. Hingga setelah Tiongkok menyetujui pembentukan TIT dibarengi dengan pembentukan CK FTA, Jepang kemudian memperlihatkan keseriusannya pada CJK FTA. Sehingga Jepang melakukan institusional *balancing* inklusif terhadap Tiongkok untuk mencapai kepentingan Jepang atas terbentuknya TIT sebelum lebih lanjut membentuk CJK FTA. Hal ini yang mendasari alasan Jepang untuk memperlambat pembentukan CJK FTA sebelum Jepang memperoleh kepentingannya atas TIT. Selain itu pembentukan CK FTA menjadi pemicu Jepang untuk menyetujui percepatan negosiasi CJK FTA, agar Jepang tidak kehilangan kontrol dan tertinggal dalam perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Korea Selatan.

### Daftar Pustaka

- [1] Atsushi, Seike 2015, "Japan's Demographic Collapse.", dalam *Examining Japans Lost Decade*, Routledge.
- [2] Duus, Peter 1976, *The Rise of Modern Japan*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- [3] Forsberg, Aaron 2002, *America and The Japanese Miracle: The Cold War Context of Japan Postwar Economic Revival, 1950-1960*, The University of North Carolina Press Chapel, London.
- [4] He, Kai 2009, *Institutional Balancing in the Asia Pacific Economic Interdependence and China's Rise*, Routledge, New York.
- [5] Kazuhiko, Toyama 2015, "The Curse of Japan Inc. and Japan's Microeconomics Competitiveness", dalam *Examining Japans Lost Decade*, Routledge.
- [6] Lee, Chang Jae 2013, "The South Korean Perspective", *Joint US-Korea Academic Studies*, 24.
- [7] Rathus, Joel 2011, "An East Asian Free Trade Area: Competitive Arrangements.", dalam *Japan, China and Networked Regionalism in East Asia*, Palgrave Macmillan, New York.
- [8] Bae, Geung Chan 2005, "Northeast Asian Cooperation Initiative and Korea's Diplomatic Tasks: A Strategy for Regional Cooperation.", *The Journal of East Asian Affairs* (Institute for National Security Strategy) 19, no. 1 (2005).
- [9] Doran, Charles F. 2012, *Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft: Interpreting China's Rise*, diakses 4 April 2017, <<http://saisjournal.org/posts/power-cycle-theory-the-shifting-tides-of-history-and-statecraft>>.
- [10] \_anon. 2005, "Explaining Ascendancy and Decline: The Power Cycle Perspective", *International Journal* 60, no. 3 (2005).
- [11] Ogita, S. Tatsushi 2002, "An Approach towards Japan's FTA Policy", *Working Paper Series* 01/02 (04).
- [12] Tsuya, Noriko 2014, "The Impacts of Population Decline in Japan: Demographic Prospects and Policy Implications", *Reexamining Japan in Global Context*.
- [13] Bo, Lu 2008, *CJK FTA, Political Obstacles and Economic Difficulties*, bahan presentasi dalam seminar yang diselenggarakan oleh KIEP, diakses 21 Maret 2017, <<http://www.kiep.go.kr/cmm/fms/FileDown.do;jsessionid=00000000000001818710&fileSn=0>>.
- [14] Joint Study Committee 2011, *Joint Study Report for an FTA among China, Japan and Korea*, 6 December 2011, diakses 21 Maret 2017 <[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/pdfs/0330\\_10\\_01.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/pdfs/0330_10_01.pdf)>.

- [15] Ministry of Foreign Affairs of Japan 2000, "Chapter II: Sectoral Analysis of the International Situation and Japan's Foreign Policy", dalam *Diplomatic Blue Book*, <<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/II-2-a.html>. diakses 9 Juni 2017>.
- [16] Urata, Shujiro 2007, "Japan's FTA Strategy and Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP)", dalam *Pacific Economic Cooperation Council (PECC/ABAC) Joint Study on Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)*, diakses 21 Maret 2017, <<https://www.pecc.org/resources/trade-and-investment-1/2038-japans-fta-strategy-and-free-trade-area-of-asia-pacific-ftaap/file>>.
- [17] China FTA Network 2012, *FTA negotiations among China, Japan, S. Korea launched*, November 2012, diakses 21 Maret 2017, <[http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinarihen/chinarihennews/201211/11297\\_1.html](http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinarihen/chinarihennews/201211/11297_1.html)>.
- [18] Hatoyama, Yukio 2009, *Japan's New Commitment to Asia Toward the Realization of an East Asian Community*, 15 November 2009, diakses pada 17 Juni 2017, <[http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/statement/200911/15singapore\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/statement/200911/15singapore_e.html)>.
- [19] Ian, Johnson dan Shanker, Thom 2012, *Beijing Mixes Messages Over Anti-Japan Protest*, diakses 21 Maret 2017, <<http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/asia/anti-japanese-protests-over-disputed-islands-continue-in-china.html>. diakses 21 Maret 2017>.
- [20] Ichi, Shigeki, Hattori, Susumu, dan Michael, David 2012, "How to Win in Emerging Markets: Lessons from Japan", *Harvard Business Review*, Mei 2012, diakses 18 Juni 2017, <<https://hbr.org/2012/05/how-to-win-in-emerging-markets-lessons-from-japan>>.
- [21] International Monetary Funds 2012, *Direction of Trade Statistic*, diakses 2 Juni 2017, <<http://www.imf.org/en/Data>>.
- [22] Ministry of Economic Trade and Industry Japan 2012, *Press Release on the Launch of the FTA Negotiation Among Japan, China, and the ROK*, <[http://www.meti.go.jp/english/press/2012/1120\\_01.html](http://www.meti.go.jp/english/press/2012/1120_01.html). diakses 13 Juni 2017>.
- [23] Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)*, diakses 1 Juni 2017 <<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/>>.
- [24] Noda, Yoshiko 2011, *Press Conference by Prime Minister Yoshiko Noda*, 11 November 2011, diakses 2 Juli 2017 <[http://japan.kantei.go.jp/noda/statement/201111/11kaiken\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/noda/statement/201111/11kaiken_e.html)>.
- [25] Qingfen, Ding 2012, *Japan 'eager' to join trilateral FTA*, diakses 14 Juni 2017 <[http://europe.chinadaily.com.cn/world/2012-05/26/content\\_15392233.htm](http://europe.chinadaily.com.cn/world/2012-05/26/content_15392233.htm)>.
- [26] Smil, Vaclav 2015, *Demography is Destiny, and Japan's Population is Getting Too Old for The Country's Economic Health*, diakses 1 Juni 2017, <<http://spectrum.ieee.org/energy/policy/japan-has-aged-out-of-its-economic-miracle>>.
- [27] Soble, Jonathan dan Mozur, Paul. *In Industry Shift, Sharp Looks Outside Japan for a Buyer*, diakses 1 Juni 2017, <<https://www.nytimes.com/2016/02/05/business/international/sharp-in-search-for-buyer-says-its-leaning-toward-foxconn.html>>.
- [28] Teather, David 2010, *China Overtakes Japan as World's Second-largest Economy*, diakses 1 Juni, <2017<https://www.theguardian.com/business/2010/aug/16/china-overtakes-japan-second-largest-economy1>>.
- [29] William, Wan 2010, *Boat Collision Sparks Anger, Breakdown in China-Japan Talks*, diakses pada 21 Maret 2017 <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/20/AR2010092000130.html>>.